

## PERJALANAN BIOSKOP KELILING DARI MEDIA HIBURAN HINGGA PROPAGANDA

Ilmiawati Safitri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga

e-mail penulis: [ilmiauwatisafitri@gmail.com](mailto:ilmiauwatisafitri@gmail.com)

Naskah diterima: 15/11/2022, Naskah direvisi: 20/11/2022, Naskah disetujui: 22/11/2022

### ABSTRACT

*Mobile cinema has existed since the reign of the Dutch East Indies. The people were always waiting for cheap entertainment from the government to go to the village. The existence of mobile cinema which became the prima donna of public entertainment was used by the government, especially during the Japanese occupation. Japan used it as a propaganda tool to support the war it was waging against the allies. This paper seeks to reconstruct the journey of mobile cinema that once colored the Indonesian entertainment scene. Mobile cinema, which is synonymous with entertainment, can in fact become a media wrapped in politics with the interests of the regime rulers.*

*This study uses the historical method which explains the research problem from a historical perspective. The results of the study show that mobile cinema has many important roles, including promoting national films and government programs such as family planning, vaccines, elections and others. Through mobile cinemas, national films can be enjoyed by the wider community and government programs can be delivered directly to the public. At the end of the 1990s technology was growing, various entertainments emerged and entered the countryside. Mobile cinema slowly disappeared and began to be forgotten. Meanwhile, after a long period of dim, in the era of digital technology, mobile cinema is now back. With a modern and practical concept, several mobile cinemas have been brought to life in areas of Indonesia*

*Keywords: Mobile Cinema, Entertainment, Propaganda, Society*

### ABSTRAK

Bioskop keliling sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat selalu menantikan hiburan murah dari pemerintah masuk ke desa. Eksistensi bioskop keliling yang menjadi primadona hiburan masyarakat dimanfaatkan oleh pemerintah, terutama pada masa pendudukan Jepang. Jepang menggunakannya sebagai alat propaganda untuk mendukung perang yang sedang dijalaninya melawan Sekutu. Tulisan ini berupaya merekonstruksi kembali perjalanan bioskop keliling yang pernah mewarnai panggung hiburan Indonesia. Bioskop keliling yang identik dengan hiburan, nyatanya dapat menjadi media berbalut politik dengan kepentingan-kepentingan penguasa rezim.

Kajian ini menggunakan metode sejarah yang menjelaskan persoalan penelitian berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa bioskop keliling memiliki banyak peranan penting, diantaranya yaitu memasyarakatkan film

nasional dan program pemerintah seperti KB, vaksin, pemilu dan lain-lain. Melalui bioskop keliling, film nasional dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan program pemerintah dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Akhir tahun 1990-an teknologi semakin berkembang, aneka hiburan bermunculan dan masuk ke pedesaan. Bioskop keliling perlahan hilang dan mulai dilupakan. Adapun setelah sekian lama redup, di era teknologi digital kini bioskop keliling hadir kembali. Dengan konsep modern dan praktis beberapa bioskop keliling telah dihidupkan di daerah-daerah Indonesia.

**Kata kunci:** Bioskop Keliling, Hiburan, Propaganda, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, yang kala itu masih Hindia Belanda memutar film dalam suatu gedung permanen di depan publik untuk pertama kalinya di Tanah Abang, Batavia pada 5 Desember 1900 dengan nama Gambar Idoep (Nantinya menjadi bioskop pertama di Hindia Belanda). Semula penayangan film ini berpindah-pindah tempat atau berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Masyarakat antusias, maka berkembanglah gambar idoep di Hindia Belanda dari waktu ke waktu.

Bioskop sebagai ujung mata rantai perfilman merupakan tempat bertemunya konsumen (penonton) dengan komoditas jasa yang bernama film. Untuk pertama kalinya di Hindia Belanda, dibuatlah film bisu dengan aktor pribumi yang berjudul “Loetoeng Kasaroeng”, dengan sutradara Belanda yang bernama G. Kruger dan L. Heuvelorp. Dari sinilah awal mula film nasional mulai dibuat dan terus berkembang.<sup>1</sup>

Dalam artikel ini definisi bioskop terbagi menjadi dua, yaitu bioskop berupa gedung permanen yang menetap di suatu tempat dan bioskop non permanen yang sifatnya berpindah atau berkeliling. Fokus yang akan ditulis adalah bioskop non permanen yang biasa disebut dengan bioskop keliling. Di masa itu, pengusaha film tidak hanya menggunakan bioskop gedung dalam mengedarkan film, tetapi bioskop keliling ikut andil dalam mempromosikan film-film yang ada, baik lokal maupun impor. Saat itu, masyarakat mengenal bioskop keliling dengan istilah layar tancap (diputar dengan penyangga layar putih yang ditancapkan ke tanah) atau film sorot (film yang ditayangkan disorotkan langsung ke layar putih yang membentang di tanah lapang).

Bioskop keliling sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan bioskop keliling untuk memasyarakatkan program-program pemerintahan yang mereka miliki hingga ke pelosok desa. Dilanjut ketika pendudukan Jepang, bioskop keliling digunakan sebagai sarana propaganda guna memenangkan Perang Asia Timur Raya melawan Amerika. Di awal masa Kemerdekaan bioskop keliling kurang mendapat perhatian karena dianggap sebagai sarana dan usaha yang setara dengan kaki lima. Selanjutnya bioskop keliling kembali mendapat perhatian pemerintah ketika masa Orde Baru, dimana Soeharto menggunakan bioskop keliling sebagai media hiburan murah masyarakat dan media propaganda guna menyukseskan program-program pemerintah. Pada tahun 1978 pemerintah memberi wadah khusus bagi pengusaha bioskop keliling dalam sebuah organisasi yang bernama PERBIKI (Persatuan Pengusaha Bioskop Keliling Indonesia) dan berubah nama menjadi PERFIKI (Persatuan Pengusaha Film Keliling Indonesia) pada 1991.

Dari uraian di atas timbul pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana dinamika bioskop keliling dari masa ke masa?” dan “Bagaimana Bioskop Keliling menempatkan diri sebagai media hiburan sekaligus media propaganda pemerintah dari periode satu ke periode lainnya?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

---

<sup>1</sup> Ekky Imanjaya, Eric Sasono, dan Hikmat Darmawan, *Menjegal Film Indonesia* (Jakarta: Rumah Film, 2011), 52.

mengetahui dinamika bioskop keliling sebagai media hiburan dan propaganda dengan menelusuri sejarahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi dan penulisan.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Pada sumber primer berupa kumpulan tulisan para pebisnis bioskop keliling, sineas era Orde Baru dan tokoh industri perfilman era tersebut. Kumpulan tulisan ini diproduksi oleh Sinematek Jakarta, Indonesia pada tahun 1993. Serta foto-foto sezaman yang mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa pada masa tersebut. Sumber sekunder yang dimaksud berasal dari wawancara dengan penulis sejarah film, serta buku dan karya ilmiah yang telah ditulis dengan menggunakan metode penulisan sejarah ilmiah oleh para peneliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Apa itu Bioskop Keliling**

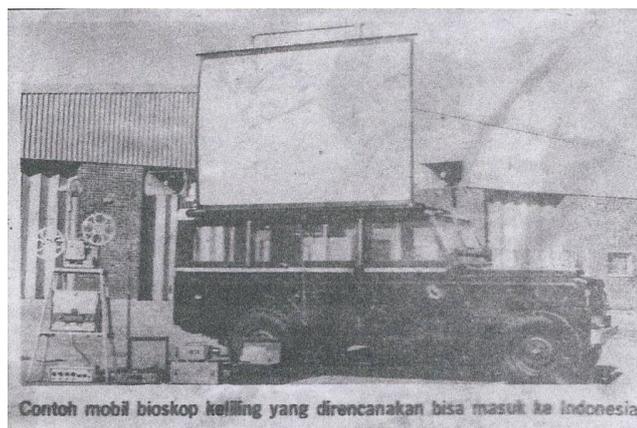
Bicara mengenai layar tancap, misbar (gerimis bubar) dan bioskop keliling tentu cukup asing di telinga muda-mudi generasi milenial masa kini. Tak banyak dari mereka yang mengetahui secara pasti seperti apa perjalanan dan perkembangan media hiburan tersebut. Layar tancap dan bioskop keliling pernah menjadi hiburan primadona bagi masyarakat pada masa Orde Baru. Layar tancap dan bioskop keliling yang memiliki konsep hiburan bagi masyarakat pedesaan adalah hiburan murah dan disukai kaum muda-mudi yang menjadikannya sebagai tempat berkumpul dan bercengkrama.

Jika diartikan secara harfiah, layar tancap pertama kali ada di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda. Sedangkan penamaan bioskop keliling ada pertama kali ketika masa pendudukan Jepang. Sebenarnya keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara pemasangan layarnya saja. Perbedaannya adalah apabila layar tancap dipasang dengan membentangkan kain atau layar dengan mengikat sisi kiri dan kanan dengan tali pada tiang penyangga yang sudah ditancap kuat dalam tanah. Jika bioskop keliling, layar putih untuk pertunjukan ini dibentangkan di atas mobil, atau proyektor sorot diletakkan di atas mobil. Tetapi terkadang juga dipasang layaknya layar tancap. Keduanya sama-sama berkeliling dan membawa peralatannya menggunakan mobil, hanya saja bioskop keliling lebih praktis dan modern dibanding layar tancap yang sudah ada sejak masa sebelum Jepang. Peralatan seperti proyektor film sebagai perangkat media penerima gambar juga sama. Kain layar putih yang dibentangkan ukurannya juga hampir sama yaitu 3x5 meter atau lebih.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69

<sup>3</sup> Wawancara dengan Fandy Hutari (Periset Sejarah Hiburan Indonesia), 15 November 2018.



Gambar 1. Mobil bioskop keliling yang direncanakan bisa masuk ke Indonesia  
Sumber: Majalah Pos Film 16 Juni 1978



Gambar 2. Layar tancap siap ditonton masyarakat di tanah lapang tahun 1980-an  
Sumber: validnews.co

Bagi sebagian orang, penamaan layar tancap atau bioskop keliling dianggap sama karena fungsi dan peralatan yang digunakan hampir sama. Teknologi lawas yang digunakan membuat layar tancap atau bioskop yaitu format seluloid berukuran 16 mm atau 35 mm dan kualitas gambarnya masih standar atau kurang bagus.<sup>4</sup> Berbeda dengan film yang ditayangkan pada gedung bioskop yang kualitasnya terkadang lebih bagus karena didapat langsung dari distributor. Biasanya film-film bioskop keliling adalah film second run yaitu film yang telah ditayangkan di gedung bioskop 4 hingga 5 bulan yang lalu.

Dari tahun ke tahun, perjalanan bisnis bioskop keliling semakin berkembang. Pada tahun 1990-an menjadi mode atau kadar gengsi bagi orang desa yang mengadakan pesta perkawinan atau khitanan. Semakin banyaknya pengusaha bioskop keliling di Indonesia maka pemerintah akhirnya memberikan perhatian khusus pada para pengusaha lalu didirikanlah organisasi Persatuan Pengusaha Bioskop Keliling Indonesia (PERBIKI) ada tahun 1978.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Okezone, "News," diakses 5 November 2022, <https://news.okezone.com>.

<sup>5</sup> Hidayat Effendi, *Mengenal Bioskop Keliling Lebih Jauh* (Jakarta: DPP Perfiki, 1993), 34.

## Sebelum Muncul Bioskop Keliling, Misbar (Gerimis Bubar) atau Layar tancap Menjadi Hiburan Primadona Masyarakat (Masa Hindia Belanda)

Di akhir tahun 1900 melalui surat kabar yang tertera di surat kabar Bintang Betawi termuat kabar yang menggemparkan masyarakat Batavia. Nederlandsche Bioscope Maatschappij (perusahaan bioskop Belanda), pada tanggal 5 akan menyelenggarakan pertunjukan besar pertama yang akan berlangsung tiap malam di sebuah rumah di Tanah Abang Kebondjae, di sebelah pabrik kereta Maatschappij Fuchss.<sup>6</sup>



Gambar 1. Para Pengunjung Bioskop Rex Batavia ketika akan Menyaksikan Film The Dawn Patrol tahun 1939  
Sumber: <http://www.kitlv.nl>

Kegemparan yang ditimbulkan barang ajaib bernama gambar idoep itu, tanpa diduga mereda dengan cepat. Orang ramai membicarakan tontonan yang dipertunjukkan oleh Tuan Scharwz di sebuah rumah yang difungsi gandakan tersebut, tak jauh bedanya dengan gambar idoep yang sering dipertunjukkan Tuan Talbot di Pasar Gambir, di muka Stasiun Kota maupun di Lokasari, Manggabesar. Bedanya, Tuan Scharwz menyajikan pertunjukan dalam sebuah rumah di Tanah Abang, Kebondjae yang kelak bernama The Rojal Bioscope. Sedangkan Tuan Talbot dan rekan-rekannya selalu mempertunjukkan di dalam bangunan berdinding gedek beratap seng, yang didirikan di lapangan terbuka dan selalu berpindah-pindah, kelak pertunjukan ini bernama Misbar (Gerimis Bubar) atau Layar tancap.<sup>7</sup> Di tempat Tuan Talbot inilah nantinya menjadi tempat yang sejak 1968 terselenggara Pekan Raya Jakarta “Djakarta Fair”.<sup>8</sup>

Sebelum Perang Dunia II pemutaran layar tancap pernah dilakukan di Lapangan Gambir. Film yang pertama diputar adalah film penerangan tentang penyakit Pes, maka pertunjukan itu lebih dikenal sebagai “Film Pes”, walaupun kemudian ditayangkan pula tentang penyakit-penyakit lain. Konsep propaganda “Film Pes” dari pemerintah Belanda maupun bioskop keliling dari pemerintah

<sup>6</sup> M. Abduh Aziz et al., *Layar perak: 90 tahun bioskop di Indonesia*, ed. oleh Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 1992).

<sup>7</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>8</sup> S.M. Ardan, *90 Tahun Bioskop di Indonesia* (Jakarta: Sinematek Indonesia, 1990), 9.

Jepang ini gratis dan terbuka untuk umum. Loeteoeng Kasaroeng (1926) merupakan film pertama yang diputar oleh Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi tidak mengandung unsur propaganda. Film propaganda pertama yang diputar berjudul Tanah Seberang. (1936). Menceritakan kebijakan transmigrasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda kepada masyarakat Indonesia. Pemutaran film-film propaganda ini dilakukan hanya di kawasan-kawasan tertentu saja. Maka dapat dikatakan bahwa Jepanglah yang memelopori pertunjukan layar tancap atau bioskop keliling karena daerah operasinya amat luas.<sup>9</sup>

Di Batavia terdapat dua bioskop elit di Pintu Air, salah satunya bernama ‘Elita’ yang kebanyakan dikunjungi orang-orang Belanda. Harga tiket yang ditawarkan sangat mahal, yaitu f 1,80 untuk film biasa, dan f 2,40 untuk film istimewa. Lainnya bernama bioskop “Globe” di Pasar Baru. Di Pasar Baru inilah umumnya orang-orang “kota”, kebanyakan Cina datang menonton. Kedua bioskop bintang ini merupakan bangunan dari batu yang beratapkan seng. Sementara yang di Kebondjahe (bioskop pertama) adalah bangunan biasa, bukan gedung yang sengaja didirikan untuk bioskop.

Berbeda keadaan dengan kawasan di Glodok/Pancoran, tidak ada bioskop permanen. Lebih tepat disebut semi-permanen. Berupa los, bangunan dari dinding bambu dengan atap rumbia. Sifatnya tidak tetap, sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan dari satu kota ke kota lain di luar Batavia. Seiring berjalannya waktu Misbar atau Layar tancap yang ada di Batavia ini semakin berkembang. Dimana awalnya bersifat semi permanen kemudian menjadi permanen atau menjadi gedung bioskop tetap. Bioskop-bioskop misbar di tempat-tempat terbuka seperti di Uni Park dijadikan daya tarik untuk mengundang pengunjung ke taman rekreasi tersebut.<sup>10</sup> Bioskop permanen dan misbar nyaris menjadi satu-satunya sarana hiburan, terutama untuk golongan Eropa menengah ke bawah dan pribumi.

### **Dinamika Bioskop Keliling dari Masa ke Masa**

Pada tahun-tahun sebelum kependudukan Jepang, produksi film Indonesia mengalami “masa panen” pertama kali tahun 1941. Di tahun ini tercatat sebanyak 41 judul film yang diproduksi. Terdiri dari 30 film cerita dan 11 film yang bersifat dokumenter. Film-film yang diproduksi kebanyakan bertema romantisme yang diselengi lagu, tarian, lawakan dan sedikit action atau laga. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama karena di tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia dan melarang aktivitas pembuatan film. Seluruh masyarakat diminta berpartisipasi dalam perang Asia Timur Raya.

Pemerintah Jepang menutup semua perusahaan film swasta. Peralatannya disita, kemudian digunakan untuk menambah peralatan di “Nippon Eigasha” kelak menjadi PPFN (Pusat Produksi Film Negara), bekas studi milik Belanda ANIF/Multi.

---

<sup>9</sup> Tufik Abdullah, *Film Indonesia Bagian I (1900-1950)* (Jakarta: Dewan Film Nasional, 1993), 183.

<sup>10</sup> Ardan, *op. cit.*, 19.

Jepang mendatangkan ahli film dari Tokyo dan menjanjikan Tanah Jawa akan menjadi pusat penyebaran gambar Idoep. Film-film impor dibatasi kehadirannya dengan pelarangan penggunaan bahasa selain Jepang dan Indonesia dalam segala bentuk komunikasi.<sup>11</sup> Selama masa pendudukan Jepang inilah, film secara terang-terangan digunakan sebagai alat propaganda politik. Film yang diputar, selain film dokumenter Jepang yang menonjolkan “kegagahan” Jepang, film Jerman yang merupakan sekutu Jepang juga ramai ditayangkan.

Jepang yang anti Barat melakukan dewesternisasi dalam bidang apapun, termasuk dalam dunia film dan bioskop. Setelah perusahaan film dan perusahaan distributor film Jepang memiliki stok yang cukup, maka seluruh pertunjukan film Amerika dan Inggris dilarang. Impor film asing dihentikan dan nama bioskop-bioskop diganti, misalnya Rex Bioscoop di Jakarta menjadi Yo Le Kwan, Emma Bioscoop Malang menjadi Ki Rak Kwan, Centraal Bioscoop Bogor menjadi Theoeo Gekijo. Selain itu, guna menarik simpati warga yang beragama Islam, pertunjukan di waktu maghrib dan isya dilarang. Tambahan lagi, bioskop-bioskop yang semula hanya diperuntukkan bagi orang kulit putih seperti Capitol dan Deca Park, kini terbuka untuk kaum pribumi.<sup>12</sup>

Untuk keperluan hiburan dan alat propaganda dalam pemutaran film, Jepang menggunakan bioskop-bioskop yang awalnya milik orang Cina lalu diambil alih kepemilikannya. Harga tiket masuk dikenakan 10-sen bagi pribumi, 25 sen bagi orang Cina dan kelas terhormat 50 sen dan satu gulden. Jepang dengan bantuan orang-orangnya membuat jaringan propaganda di setiap sudut dan pelosok desa. Untuk Jawa dibentuk Chiho Kosakutai (Unit Operasi Distrik) yang meliputi kota-kota besar yakni, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Malang

13

Pada Desember 1943, peredaran bioskop keliling diketahui menyebar melalui operasionalisasi dari enam kota. Yakni dari Jakarta ke Bogor dan Banten. Dari Bandung ke Priangan, Cirebon dan Banyumas. Dari Yogyakarta menyebar hingga ke Solo, Madiun dan Kedu. Sedangkan dari Surabaya ke Bojonegoro dan Madiun, lalu dari Malang ke Kediri dan Besuki.<sup>14</sup>

Jepang tak tanggung-tanggung, mereka mendatangkan enam orang ahli bioskop keliling ini dari negerinya. Beberapa diantaranya dikepalai oleh orang Jepang dan yang lainnya oleh orang Indonesia. Kelompok ini berkeliling dari desa yang satu ke desa lainnya dengan membawa proyektor film, generator dan film yang diangkut oleh sebuah truk. Biasanya hanya satu atau dua desa yang dipilih dari masing-masing Son (sub-distrik) dan Gun (distrik) sebagai tempat pemutaran

---

<sup>11</sup> Garin Nugroho dan Dyna Herlina S, *Krisis Paradoks Film Indonesia* (Jakarta: FFTV-IKJ Press, 2013), 18.

<sup>12</sup> HM. Johan Tjasmadi, *100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia* (Bandung: PT Megindo Tunggal Sejahtera, 2008), 28.

<sup>13</sup> Widiatmoko, “Film Sebagai Media Propaganda Politik di Jawa pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945” (Universitas Sebelas Maret, 2010), 29.

<sup>14</sup> Abduh Aziz et al., *op. cit.*, 42.

dan rakyat dari desa-desa tetangga diundang untuk menontonnya. Film-film dipertontonkan di alam terbuka bagi siapa saja tanpa dipungut bayaran. Sedangkan penduduk dari semua desa tetangga, sebelumnya diberitahu lewat para pejabat desa.

Karena terbatasnya produksi film-film lokal, maka pemerintah mengimpor film-film Jepang yang dipilih secara hati-hati dan hanya yang dianggap berguna bagi propaganda. Meskipun demikian, upaya selama masa pendudukan Jepang untuk memanfaatkan bioskop keliling bagi indoktrinasi politik dengan skala besar sepenuhnya merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya Jepang sendiri sudah sangat berpengalaman luas dengan penyelenggaraan bioskop keliling di negeri asalnya. Dari pengalaman tersebut Jepang mengaplikasikan konsep tersebut di Jawa.<sup>15</sup>

Munculnya bioskop keliling merupakan suatu hiburan yang langka bagi penduduk desa, maka saat muncul berita kedatangan bioskop keliling, rakyat tak sabar menanti. Pada hari yang telah dijadwalkan mereka tak segan-segan berjalan beberapa kilometer ke tempat yang telah ditetapkan. Dengan demikian penguasa Jepang dengan mudah mengumpulkan massa di daerah pedesaan. Pada masa pendudukan Jepang ini, memang pemerintah kurang mementingkan segi komersil. Kepentingan mereka adalah propaganda dan penerangan. Lebih-lebih dalam film non-cerita, dimana isi film menekankan bahwa militer Jepang bukanlah agresor, tetapi pembebas bangsa Asia dari perbudakan bangsa-bangsa Barat.<sup>16</sup>

Media film yang dijadikan Jepang sebagai alat propaganda dirasa lebih efektif disebarluaskan pada kalangan tak terpelajar, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan jauh dari sumber-sumber informasi. Di desa-desa, pertunjukan yang berbau hiburan sangat diminati dan sangat menarik hati pengunjung yang dipertunjukkan oleh tim propaganda film keliling. Hal ini merupakan kesempatan emas untuk menarik hati masyarakat. Mereka yang datang tertarik dengan adanya hiburan murah, tak sadar bahwa mereka akan “diindoktrinasi”. Maka pada masa pendudukan Jepang, propaganda menjadi bagian yang tak terpisahkan dan integral dengan pemerintah militer Jepang. Untuk menguasai Jawa, Jepang berpegang pada dua prinsip yaitu: bagaimana menarik hati rakyat (*minshin ha'aku*) dan bagaimana mengindoktrinasi dan menjinakkan rakyat (*Senbu kosaku*).<sup>17</sup> Prinsip ini perlu dilaksanakan untuk memobilisasi seluruh rakyat guna mendukung kepentingan perang dan untuk mengubah mentalitas mereka secara keseluruhan. Alat-alat propaganda, seperti sandiwara, radio dan musik banyak berperan ketika Indonesia merdeka mulai 17 Agustus 1945. Pengobaran semangat agar rakyat menentang Belanda yang ingin menjajah lagi, dilakukan rombongan sandiwara seperti “Seniman Merdeka” pimpinan Ali Yugo. Lalu “Pantjawarna” dan “Bintang Timoer” pimpinan Djamaluddin Malik, “Warnasari” dan “Ratoe Asia” pimpinan

---

<sup>15</sup> Widiatmoko, *op. cit.*, 149.

<sup>16</sup> Ardan, *op. cit.*, 42.

<sup>17</sup> Widiatmoko, *op. cit.*, 230.

Syamsudin Syafei di Sumatera. Begitu Sukarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan, karyawan film Indonesia pimpinan R.M Soetarto merebut Nippon Eigasha dengan kekerasan. Maka lahirlah “Berita Film Indonesia” yang menjadi cikal bakal PPFN.

Setelah kepergian Jepang dari Indonesia, praktik bioskop keliling dan layar tancap mulai kehilangan kekuatannya sebab tidak ada lagi pengusaha yang mau bersusah payah keluar masuk kampung untuk mengadakan pertunjukan. Hal ini disebabkan dalam periode 1950-an hingga 1960-an bioskop menjadi bentuk usaha yang menguntungkan dan menjanjikan sehingga fokus untuk membawa film ke daerah pedesaan bukan sebuah prioritas pada saat itu.<sup>18</sup>

Bioskop keliling yang juga disebut layar tancap sebenarnya termasuk dalam keluarga besar dunia perfilman nasional. Akan tetapi, walau layar tancap itu potensinya besar namun dari kalangan orang film sendiri masih menganggap remeh, sinis, bahkan melecehkan kehadirannya. Panggilan “Pengamen” atau “Pedagang Kaki Lima”. Penilaian negatif banyak dilemparkan kepada pengusaha yang baru merintis usaha ini dengan alasan mereka sering melakukan pelanggaran. Contohnya memutar film untuk 17 tahun ke atas di lapangan terbuka yang juga ditonton anak-anak kecil dan peremehan-peremehan lainnya.<sup>19</sup> Sehingga pada masa ini bioskop keliling tidak menunjukkan perkembangan.

Selain karena dianggap sebelah mata, bioskop keliling tak ada perkembangan pada masa ini karena konflik politik yang tak kunjung usai. Konflik antar partai politik dan usia republik yang masih muda membuat industri perfilman Indonesia mengalami pasang surut. Krishna Sen dalam studinya menyatakan bahwa film pada tahun 1950-1960 banyak mengalami penyensoran. Sensor yang berlebihan biasanya berhubungan dengan isi yang radikal baik sayap kanan maupun sayap kiri.<sup>20</sup> Sebagai contohnya adalah film “Daerah Hilang” karya Bachtiar Siagian, seorang sutradara dan tokoh Lekra.<sup>21</sup> Munculnya organisasi PAPFIAS (Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat) yang sepakat untuk memboikot total film Amerika Serikat. Selanjutnya film-film AS dilarang diputar dimanapun, tentu ini berakibat pada usaha bioskop-bioskop dan akhirnya tutup karena langkanya film.<sup>22</sup> Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto berhasil melegitimasi kekuasaannya melalui berbagai kebijakan, tidak terkecuali perfilman. Percepatan pembangunan ekonomi memaksa pemerintah membuka pintu masuk selebar-lebarnya untuk film impor guna mendapatkan pajak masuk yang akan digunakan untuk pembangunan nasional serta menghidupkan kembali dunia perfilman yang

---

<sup>18</sup> Heru Erwanto, “Bioskop Keliling Peranannya dalam Memasyarakatkan Film Nasional dari Masa ke Masa,” *Patanjala* 6, no. 2 (2014): 292.

<sup>19</sup> Effendi, *op. cit.*, 68.

<sup>20</sup> “Krisna Sen,” *Prisma*, 1990.

<sup>21</sup> JB. Kristanto, *Katalog Film Indonesia 1926-2007* (Jakarta: NALAR, 2007), 51.

<sup>22</sup> Dwi Aris Subakti, “‘Pemboikotan Film Amerika oleh PAPFIAS dalam Rangka Propaganda Politik’ 1964” (Universitas Sebelas Maret, 2006), 12.

dilanda kelesuan.<sup>23</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung dunia perfilman nasional. Akan tetapi nampaknya regulasi ini hanya menjadi wacana pemerintah, melihat bentuk kebijakan yang dibuat hanya menjadikan film sebagai komoditas dagang.

Kebijakan selanjutnya yaitu pada masa Menteri Penerangan Harmoko (1983-1996) yang mengusung konsep kedekatan dengan rakyat dan mampu menjalin komunikasi sampai ke pelosok desa. Oleh sebab itu, masyarakat pelosok desa dapat menikmati film melalui bioskop keliling yang mampu memberikan tontonan film-film Indonesia.<sup>24</sup> Setelah jabatan Menteri Harmoko berakhir, jabatan selanjutnya diserahkan kepada Hartono (1996-1997) dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Masa bakti yang singkat, kedua menteri ini hanya mampu meneruskan kebijakan yang telah ada dan tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan.

Sejak dini, rezim Orde Baru menyadari pentingnya film sebagai alat propaganda. Beberapa film bertema sejarah diproduksi pada masa ini. Janur Kuning, Serangan Fajar, dan Pengkhianatan G 30 S PKI yang merupakan film propaganda. Pada tahun 1970-1990-an film-film ini wajib diputar di seluruh bioskop Indonesia. Melihat kondisi di lapangan bahwa tidak semua daerah memiliki bioskop, maka pemerintah memanfaatkan media bioskop keliling sebagai ujung tombak distribusi film hingga pelosok desa.

Dalam perkembangan perbioskopian film keliling di Indonesia sebagai usaha yang menguntungkan sudah ada sejak masa Jepang dan berlanjut pada masa Orde Lama, bioskop keliling belum menunjukkan jati dirinya. Perjalanan bioskop keliling yang semakin berkembang, membuat banyak orang membuka peluang usaha seperti nama-nama: Ayong Suteja, Suryo Kencono, Hasan Basri Raja Medan dan lain-lain yaitu para pengusaha bioskop keliling yang mengawali karirnya tahun 1960-an. Dengan proyektor 16 mm dan perusahaan yang belum berbadan hukum, mereka mulai mengajak pengusaha-pengusaha lainnya dan memelopori lahirnya organisasi PERBIKI pada 1977.

Usaha film keliling pada mulanya tidak mendapat perhatian dari kalangan perfilman di negeri ini dan dianggap tidak lebih dari sekedar pengamen. Sumbangan terhadap perfilman di Indonesia dianggap kurang. Sedangkan pengusaha bioskop keliling sendiri juga belum memiliki arah untuk berorganisasi. Ibarat seperti ayam tak punya induk, mereka beroperasi sendiri, jika ada suatu permasalahan maka harus diatasi sendiri.

Berbagai permasalahan datang silih berganti, masalah permodalan merupakan masalah yang paling pelik dihadapi oleh para pengusaha. Kondisi ini menimbulkan gagasan untuk menyatukan bahasa dan gerak yang terkoordinir. H. Zein Arsyad mencetuskan gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi guna mewedahi dan mengkoordinir pengusaha-pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Tahun 1977

---

<sup>23</sup> Wisnu Agung Prayoga, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Perfilman Indonesia Tahun 1966-1979" (Universitas Indonesia, 2009), 36.

<sup>24</sup> Muhammad Bayu Widagdo, "Peran Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi" (Universitas Diponegoro, 2011), 71.

berkumpullah para pengusaha bioskop keliling di Tebet, Jakarta Selatan. Peserta yang hadir baru sebanyak 20 orang, sehingga belum terbentuk sebuah organisasi yang diinginkan. Pertemuan selanjutnya pada awal tahun 1978, berkumpullah para pengusaha dan semakin banyak yang ikut hadir. Maka disepakatilah pembentukan sebuah yayasan Persatuan Pengusaha Bioskop Keliling Indonesia (PERBIKI) yang disahkan pada April 1978.

Ketua pertama adalah Yung Indrajaya, ia memulai kinerjanya dengan memperbaiki organisasi agar memperoleh pengakuan melalui jalur hukum sehingga organisasi yang dipimpinnya dapat bergerak lebih leluasa dan kedudukannya. Selanjutnya Yung menyusun kepengurusan Perbiki dengan menempatkan para pengusaha bioskop keliling yang berpotensi sebagai pengurus inti organisasi:

**Ketua Umum: Yung Indrajaya**

**Wakil Ketua: Bolh Sumardi**

**Sekjen: A. Aidizars**

**Bendahara: Ayong Suteja dan Munthalibsy**

Kerangka kerja pertama Perbiki yang sangat didukung oleh pemerintah adalah konsep "Film Masuk Desa". Kemunculan konsep film masuk desa sangat membantu pemerintah Orde Baru menyukseskan program-program pembangunan nasional yang dibuatnya. Wakil Presiden Adam Malik menyambut baik program film nasional masuk desa yang dicetuskan Pengurus Pusat Perbiki di bawah arahan Yung Indrajaya. Adam Malik dengan penuh rasa kekeluargaan menyatakan rasa setujunya dan sekaligus memberi dukungan atas program-program tersebut. Maka diharapkan agar pihak Perbiki menjalin kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Pertanian, untuk kemungkinan diputarnya film-film bertema pendidikan dan penyuluhan terhadap pertanian.

Respon hangat yang diberikan wakil presiden Adam Malik sekaligus memberikan dampak positif terhadap organisasi yang tergolong muda ini. Jika dilihat, para pengurus pusat Perbiki berusaha sesegera mungkin mendapatkan pengakuan dari pemerintah di bawah kendali Departemen Penerangan. Adam Malik mengungkapkan rasa keprihatinnya, lantaran 85% rakyat kecil yang ada di pedesaan belum menikmati hiburan film.<sup>25</sup>

Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Penerangan, Perbiki sebagai organisasi yang berdiri sendiri, bukan sebagai bawahan GPBSI (Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia) dirasa cukup rumit. Ketika masih bernama Perbiki, organisasi ini dianggap kurang baik, dengan jumlah anggota pengusaha bioskop keliling yang berjumlah 250 orang. Pada tanggal 2 Oktober 1991, nama PERBIKI diubah menjadi PERFIKI (Persatuan Perusahaan Pertunjukan Film Keliling Indonesia) yang maksudnya untuk lebih memperjelas peran serta usaha pertunjukan film keliling. Guna lebih jelas dan terarah peran serta Perbiki, kegiatan film keliling dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertunjukan Film Keliling Komersil
2. Pertunjukan Film Keliling Promosi

---

<sup>25</sup> Effendi, *op. cit.*, 27.

3. Pertunjukan Film Keliling Pesanan/Perayaan

4. Pertunjukan Film Keliling Sosial-Penerangan.<sup>26</sup>

Berbagai kongres dan perkumpulan diadakan guna membenahi dan memperbaiki program-program organisasi agar lebih baik. Berdasarkan laporan organisasi, kongres yang terakhir diadakan adalah pada tahun 1993 di Bandung. Dikarenakan banyak konflik baik intern maupun ekstern, maka bioskop keliling semakin tenggelam ditelan arus modernitas dan para pengusaha semakin menyusut meninggalkan profesi mereka guna mencari penghasilan lebih banyak.

Program film masuk desa merupakan upaya pemerataan media komunikasi dan informasi serta upaya mencerdaskan masyarakat desa di bawah tanggung jawab Departemen Penerangan. Kebijakan ini muncul dengan tujuan menghilangkan kecemburuan sosial yang terjadi akibat belum meratanya pembangunan di desa dengan kota. Banyaknya wilayah pedesaan yang belum memiliki gedung bioskop karena belum meratanya pembangunan menjadikan bioskop keliling sebagai solusi media hiburan masyarakat desa. Pada awal tahun 1960-an terdapat perusahaan bioskop keliling lengkap dengan tiga unit alat (mobil, layar dan proyektor) di Jawa.<sup>27</sup> Hingga pada pertengahan tahun 1970-an perusahaan tersebut memiliki 20 unit perlengkapan bioskop keliling, dan menyebarlah usaha bioskop keliling di seluruh Indonesia.

Dukungan demi dukungan dari pemerintah datang pada organisasi Perbiki. Kolaborasi Perbiki dengan BKKBN, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Luar Negeri dan instansi pemerintah lainnya dalam menyebar luaskan program pemerintah hingga ke pelosok desa membuat organisasi ini semakin maju. Perbiki sebagai organisasi pengedar film sudah tentu memutar film melalui mobil-mobil unit dan akan memutar film-film yang bisa diterima oleh kondisi masyarakat di desa-desa terlebih bagi film-film yang ada kaitannya dengan pembangunan. Seperti keluarga berencana, transmigrasi, koperasi, sosialisasi pemilu, kesehatan dan film-film gelora pembangunan Pelita I, II dan seterusnya.

Anggota Perbiki dengan sukarela memutar film-film penerangan sebelum film cerita. Akan tetapi hal ini tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha ketika akan mengadakan pertunjukan. Guna pengurusan izin biaya yang dikeluarkan tidak seberapa, tetap “uang rokok-nya” justru lebih besar, karena jika tak memberi “uang rokok” maka izin akan dipersulit. Kendala ketidakcocokan film yang dibawa oleh antusiasme penonton juga kadang terjadi, sehingga para pengusaha membawa roll film cadangan, supaya penonton tidak kecewa.

Di masa Orde Baru, film nasional telah menjadi tuan rumah dan dicintai seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai itu semua perjuangan yang dilalui cukup berat, banyak kendala yang harus dihadapi. Serbuan film impor, berdirinya stasiun televisi baik nasional maupun swasta, dan teknologi yang semakin canggih. Sambil mengais rejeki, para pengusaha bioskop keliling berusaha

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 40.

<sup>27</sup> *op. cit.*, 1990, 125–26.

meningkatkan apresiasi masyarakat untuk mencintai film nasional. Usaha mereka tidak hanya di sekitar perkotaan tapi menelusup jauh hingga ke pedesaan atau daerah terpencil. Tidak berlebihan apabila pengusaha bioskop keliling disebut sebagai ujung tombak dan pejuang film Indonesia. Karena dalam regulasinya, Perbiki atau Perfiki hanya diperbolehkan untuk memutar film-film nasional.<sup>28</sup>

Sambutan masyarakat pedesaan memang luar biasa. Mereka yang tinggalnya jauh dari lokasi pemutaran, meski harus berjalan sepanjang 4-5 km dan naik turun gunung bukan menjadi suatu masalah. Akan tetapi hal ini akhirnya redup di tahun 2000-an. Bioskop keliling mulai jarang dan sulit ditemukan, karena redupnya usaha dan minimnya permintaan tayang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran usaha ini antara lain:

Zaman yang semakin maju dan semakin modern memberikan kemudahan bagi masyarakat, fleksibilitas dan efisiensi bagi masyarakat untuk menyaksikan tayangan film melalui saluran televisi. Potensi televisi sebagai pesaing bioskop memang benar adanya, perhatian masyarakat tertuju pada layar kaca yang hampir dimiliki di setiap rumah.<sup>29</sup> Apalagi setelah hadirnya stasiun tv swasta, film-film nasional maupun impor dapat ditonton langsung lewat tv.

Pada saat yang hampir bersamaan dengan munculnya stasiun tv pertama di Indonesia, teknologi elektronik video kaset memasuki rumah-rumah penduduk, terutama mereka yang tergolong dalam kalangan menengah ke atas. Teknologi video kaset kemudian kembali berinovasi menjadi laser disc yang memiliki tampilan gambar lebih tajam, kualitas jernih dan belum ada teknologi yang mampu menyensor isinya. Dan pada tahun 1990-an mulai marak masyarakat memiliki antena parabola yang mampu menangkap siaran televisi asing berkemampuan 5 hingga 15 negara lain.<sup>30</sup> Munculnya kedua teknologi baru inilah yang paling mempengaruhi lesunya bisnis perbioskopian dan bioskop keliling.

Keluhan panjang pada pengusaha bioskop keliling karena kurangnya perhatian pemerintah membuat lesunya bisnis ini. Selain itu karena masih banyaknya pengusaha film keliling yang bukan merupakan anggota Perfiki, Yung Indrajaya dan anggota Perfiki lainnya meminta tolong pada pihak keamanan, Pangdam Jaya V untuk menertibkan. Hal ini tidak mudah, karena pihak keamananpun terkadang menganggap laporan ini hanyalah angin lalu. Pada tahun 1990-an hingga akhir Orde Baru, maraknya kasus premanisme. Pengusaha bioskop keliling yang sedang memutar film di acara hajatan tiba-tiba diserang gerombolan pemuda, dan merusak peralatan pemutaran film.<sup>31</sup> Hal ini membuat jera para pengusaha untuk kembali memutar film, karena modal mereka habis dan harus menanggung rugi cukup banyak.

---

<sup>28</sup> Effendi, *op. cit.*, 57.

<sup>29</sup> Novi Kurnia, *Menguak Peta Perfilman Indonesia* (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004), 11–112.

<sup>30</sup> Endi Zulkarnaen, "Bioskop dari Kota Klaten 1950-an-2000" (Universitas Gajah Mada, 2013), 112–13.

<sup>31</sup> Effendi, *op. cit.*, 41.

Selain dua faktor di atas, bioskop keliling yang sering dikenal sebagai layar tancap oleh masyarakat masih sering dipandang sebelah mata atau diremehkan oleh kalangan orang film itu sendiri. Penilaian negatif banyak dilemparkan kepada para pengusaha ‘kaki lima’ ini dengan alasan “Mereka sering melanggar aturan yang telah ditetapkan”. Seperti memutar film dewasa di lapangan terbuka padahal banyak anak-anak kecil yang ikut menonton. Selain itu, terkadang pengusaha layar tancap atau bioskop keliling yang beroperasi di pinggiran kota atau di pedesaan lalai dalam urusan surat perizinan. Sehingga menyebabkan konflik dengan pemerintah daerah. Dalam buku “Mengenal Bioskop Keliling lebih Jauh” Acub Zainal (Ketua Perfiki era Orde Baru) mengatakan bahwa banyak tuduhan buruk diberikan kepada para pengusaha bioskop keliling. Seperti tuduhan sering membajak film dari bioskop, hal ini meningkatkan sinisme insan perfilman terhadap para pengusaha bioskop keliling.

Aktivitas pemutaran film keliling besar dirasakan oleh masyarakat pedesaan, kehadiran mereka memang sangat didambakan. Namun nyatanya saat di lapangan, Zahri Rahman seorang pengusaha bioskop keliling mengaku sering menjadi korban pemerasan oknum petugas di daerah. Biaya pengurusan izin pertunjukan tidak begitu besar, tetapi justru ‘uang rokok’ yang diminta oknum akan lebih besar. Di tahun 1992 premanisme dan pungutan liar seperti ini kerap dirasakan oleh para pengusaha. Jika tidak mengikuti keinginan mereka, maka para oknum ini akan main hakim sendiri dengan menyita film, mengembalikan roll film kepada pemilik film atau dengan ancaman kekerasan. Kadang tebusan oknum pada saat itu mencapai 100.000-400.000.<sup>32</sup> Hal ini membuat para pengusaha rugi besar.

Masa keemasan bioskop keliling, layar tancap, maupun hiburan misbar berangsur pudar tergerus oleh teknologi digital. Guna kembali menggalakkan fungsi dan peran bioskop keliling sebagai media yang memasyarakatkan film nasional, Kemendikbud membuat agenda besar pada tahun 2013. Mobil berwarna biru yang berisi proyektor, genset, dvd player, layar dan berbagai perangkat pemutaran film lainnya, saat ini kerap dipanggil Bioling (Bioskop Keliling). Bioling adalah pemutaran film melalui layar tancap di daerah tertentu yang bertujuan memberi informasi kepada masyarakat tentang kebudayaan terkait budaya lokal. Masyarakat diajak untuk mengenal berbagai film yang memiliki nilai edukasi dan kebudayaan melalui layar tancap.<sup>33</sup> Target penonton dari program ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 68–69.

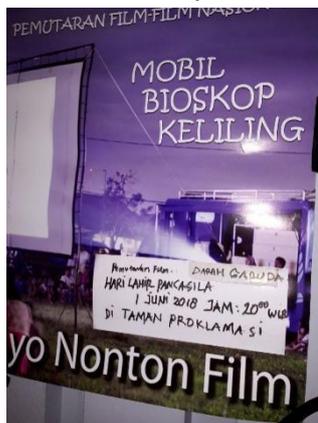
<sup>33</sup> Kemendikbud, “Biokop Keliling Penguatan Informasi Kebudayaan.



Gambar 3. Mobil bioskop keliling milik BPNB (Badan Pelestarian Nilai Budaya) Yogyakarta siap mengadakan acara menonton film bersama

Sumber: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/layanan/bioskop-keliling-2/>

Secara garis besar pada saat ini, kebijakan, target penonton dan program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud mirip dengan program yang dilaksanakan pada periode sebelum-sebelumnya. Yaitu memasyarakatkan film nasional, menyiarkan program pemerintah dan hiburan murah kepada masyarakat pedesaan.



Gambar 4. Poster Event Bioskop Keliling Kemdikbud Tugu Monumen Proklamasi, Jakarta 01 Juni 2018

Sumber: Facebook Bioskop Keliling Kemdikbud

## SIMPULAN

Film masuk ke Indonesia dalam bentuk paling sederhana berupa pemutaran film dalam bangunan berdinding bambu, beratap seng di lapangan terbuka dan tempatnya selalu berpindah-pindah. Format yang demikian itu di kemudian hari diberi label sebagai bioskop keliling. Eksistensi bioskop keliling semula karena minimnya gedung bioskop dan tidak merata keberadaannya sehingga tidak seluruh masyarakat dapat menikmatinya. Awal mula adanya film masuk ke pelosok desa adalah ketika masa pendudukan Belanda, mereka menggunakan media film untuk sosialisasi program pemerintah dalam penanganan penyakit PES. Berlanjut pada masa Jepang, bioskop keliling hadir lebih banyak, tak mau kehilangan kesempatan pemerintah Jepang menjadikan sarana ini sebagai media propaganda menyebarkan doktrin Jepang 3A (Cahaya Asia, Pemimpin Asia, Pelindung Asia).

Pemerintahan Soekarno, bioskop keliling sedikit mengalami kelesuan karena kondisi perpolitikan yang belum stabil mengakibatkan produksi film-film nasional juga belum banyak. Ditambah dengan adanya propaganda anti Amerika yang memboikot film-film Amerika secara massal. Belanjut pada masa Orde Baru, tak beda jauh dengan pemerintahan Jepang, pemerintah Orde Baru juga menggunakan bioskop keliling sebagai media propaganda program dan kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Film-film berbau propaganda dengan massif ditayangkan rutin pada masyarakat melalui media bioskop keliling. Program pemerintah seperti sosialisasi KB, transmigrasi, pemilu dan koperasi juga rutin ditayangkan di sela-sela sebelum penayangan film, dengan besar hati pengusaha bioskop keliling melakukan ini secara sukarela.

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, media hiburan semakin banyak maka tak dapat dibendung lagi hiburan bioskop keliling mulai punah. Hanya di kawasan pedalaman dan pinggiran, hiburan ini tetap eksis. Para penyelenggara hajatan terkadang masih mengundang bioskop keliling guna meramaikan acaranya. Begitu juga masyarakat urban pada tahun 2000-an, mereka yang rindu suasana masa lalu mengundang pengusaha bioskop keliling untuk menayangkan film-film zaman dahulu guna bernostalgia. Terlepas dari dinamika bisnis bioskop keliling dari masa ke masa, kita tak bisa memungkiri bahwa pada zamannya bioskop keliling telah memberikan kontribusi positif dan menyebarkan film nasional hingga pelosok desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Aziz, M., Haris Jauhari, Budiarto Danujaya, dan Johan Casmadi. *Layar perak: 90 tahun bioskop di Indonesia*. Diedit oleh Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.
- Abdullah, Tufik. *Film Indonesia Bagian I (1900-1950)*. Jakarta: Dewan Film Nasional, 1993.
- Ardan, S.M. *90 Tahun Bioskop di Indonesia*. Jakarta: Sinematek Indonesia, 1990.
- Effendi, Hidayat. *Mengenal Bioskop Keliling Lebih Jauh*. Jakarta: DPP Perfiki, 1993.
- Erwanto, Heru. "Bioskop Keliling Peranannya dalam Memasyarakatkan Film Nasional dari Masa ke Masa." *Patanjala* 6, no. 2 (2014).
- Imanjaya, Ekky, Eric Sasono, dan Hikmat Darmawan. *Menjegal Film Indonesia*. Jakarta: Rumah Film, 2011.
- Kemendikbud. "Biokop Keliling Penguatan Informasi Kebudayaan," n.d. "Krisna Sen." *Prisma*, 1990.
- Kristanto, JB. *Katalog Film Indonesia 1926-2007*. Jakarta: NALAR, 2007.
- Kurnia, Novi. *Menguak Peta Perfilman Indonesia*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.
- Nugroho, Garin, dan Dyna Herlina S. *Krisis Paradoks Film Indonesia*. Jakarta: FFTV-IKJ Press, 2013.
- Okezone. "News." Diakses 5 November 2022. <https://news.okezone.com>.
- Prayoga, Wisnu Agung. "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Perfilman Indonesia Tahun 1966-1979." Universitas Indonesia, 2009.
- Subakti, Dwi Aris. "'Pemboikotan Film Amerika oleh PAPFIAS dalam Rangka Propaganda Politik' 1964." Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Tjasmadi, HM. Johan. *100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia*. Bandung: PT Megindo Tunggal Sejahtera, 2008.
- Wawancara dengan Fandy Hutari (Periset Sejarah Hiburan Indonesia), 15 November

2018.

Widagdo, Muhammad Bayu. "Peran Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia pada Masa Orde Baru dan Reformasi." Universitas Diponegoro, 2011.

Widiatmoko. "Film Sebagai Media Propaganda Politik di Jawa pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945." Universitas Sebelas Maret, 2010.

Zulkarnaen, Endi. "Bioskop dari Kota Klaten 1950-an-2000." Universitas Gajah Mada, 2013.